



Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Nawal El Syahera Ezza ¹, Herwan Abdul Muhyi ²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: nawalelsyaheraezza@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 14-03-2025

Revision: 18-03-2025

Published: 19-03-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.733

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi realisasi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta. Melalui pendekatan campuran, penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menghitung rasio efisiensi anggaran dan menggali faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2023 berada pada kategori efisien, dengan sebagian besar anggaran berhasil terserap dengan optimal untuk mencapai target kinerja, seperti Indeks Demokrasi. Faktor-faktor yang berperan dalam efisiensi anggaran meliputi kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang transparan, sarana dan prasarana yang memadai, serta organisasi yang terstruktur dengan baik. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain keterlambatan pencairan dana dan perubahan metodologi perhitungan indikator kinerja. Penelitian ini memberikan kontribusi pada teori dan praktik pengelolaan anggaran publik dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran di masa depan.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Realisasi Anggaran, Kinerja Anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

A B S T R A C T

This study aims to analyze the efficiency of budget realization at the National and Political Unity Agency (Bakesbangpol) of the DKI Jakarta Province. Using a mixed-methods approach, the research combines quantitative and qualitative methods to calculate the budget efficiency ratio and explore the factors influencing this efficiency. The results show that the budget realization at Bakesbangpol DKI Jakarta from 2018 to 2023 remains in the efficient category, with most of the budget successfully utilized to achieve performance targets, such as the Democracy Index. Key factors contributing to budget efficiency include the quality

Acknowledgment

of human resources, transparent financial management, adequate facilities and infrastructure, and well-structured organization. However, challenges such as delayed fund disbursement and changes in performance indicator calculation methodology were encountered. This research contributes to both theory and practice in public budget management by offering recommendations for continuous improvement in future budget management.

Key word: *Budget Efficiency, Budget Realization, Budget Performance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan publik, yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi alokasi sumber daya negara. Dalam konteks sektor publik, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, perencanaan anggaran yang baik, yang mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomisitas, akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya mencukupi, namun juga dimanfaatkan dengan optimal, tanpa menimbulkan pemborosan (Siallagan & Kusmi-lawaty, 2023).

Namun, penyerapan anggaran yang rendah sering kali menjadi indikasi bahwa pengelolaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kontribusi pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara (Mardiasmo, 2018). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari seberapa optimal realisasi anggaran yang tercapai, yang menjadi indikator kinerja dalam jangka waktu tertentu (Halim & Kusufi, 2017). Penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan efisiensi, apabila dana yang digunakan tidak mendukung program prioritas dengan tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor efisiensi dalam realisasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh instansi yang dihadapkan pada tantangan dalam efisiensi pengelolaan anggaran. Data me-

nunjukkan adanya fluktuasi realisasi anggaran yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kendala administrasi, dan revisi anggaran yang sering dilakukan di tengah tahun fiskal (Tyasisuci, 2023). Kasus penurunan daya serap anggaran yang signifikan juga tercatat di lembaga pemerintah lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang disebabkan oleh hambatan teknis dan perubahan kebijakan (Baharuddin, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi realisasi anggaran belanja pada Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan menghitung rasio efisiensi berdasarkan (Mahmudi, 2019). Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang tercapai. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam teori maupun praktik pengelolaan anggaran publik, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya efisiensi anggaran berdasarkan Kaho (1997) dalam penelitian yang dikutip oleh Fahlevi & Ananta (2015), yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis efisiensi realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah *sequential explanatory*, yang dimulai dengan analisis kuantitatif untuk menghitung rasio efisiensi anggaran dengan membandingkan realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan, dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait untuk menggali faktor-faktor yang terjadinya efisiensi penggunaan anggaran, yang dilihat dari empat indikator utama, yaitu sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi menurut Kaho (1997) dalam penelitian yang dikutip oleh (Fahlevi & Ananta, 2015). Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti SPJ, LKIP, dan LRA selama periode 2018 hingga

2022. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi anggaran dan mengklasifikasikan hasilnya, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan wawancara dan observasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi metode, pengamatan lanjutan, dan peningkatan ketekunan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

HASIL

Target dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai media pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola. Laporan ini memuat rincian mengenai target dan realisasi anggaran belanja, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, selama enam tahun terakhir, yaitu dari 2018 hingga 2023. Tabel 2 berikut menunjukkan rincian target dan realisasi anggaran belanja pada Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta 2018-2023

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
2018	Rp 101.824.947.847	Rp 97.264.267.594	Rp 4.560.080.253
2019	Rp 98.853.166.043	Rp 90.505.392.908	Rp 8.347.773.135
2020	Rp 38.521.127.789	Rp 35.835.172.406	Rp 2.685.955.383
2021	Rp 98.815.598.750	Rp 98.020.251.696	Rp 795.347.054
2022	Rp 100.707.824.427	Rp 96.992.474.583	Rp 3.715.349.844
2023	Rp 1.237.198.696.187	Rp 1.230.965.317.333	Rp 6.233.378.854

Sumber: SPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pengukuran Efisiensi Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi, (2019) efisiensi adalah alat untuk mengukur sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output. Pengukuran rasio efisiensi bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Organisasi dikatakan efisien jika output atau hasil yang dicapai bisa melampaui atau melebihi target yang telah ditetapkan diawal dengan menggunakan input yang sama. Pengukuran tingkat efisiensi organisasi dalam menyerap suatu anggaran

bisa dilakukan dengan cara membagi antara realisasi belanja dengan total target anggaran belanja kemudian dikali dengan 100%. Hasil dari perhitungan tersebut yang nantinya akan menentukan bahwa organisasi tersebut sudah efisien atau belum efisien dalam menyerap suatu anggaran. Berikut adalah perhitungan efisiensi untuk anggaran belanja pada Badan Kesbang-pol:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 97.264.267.594}{\text{Rp } 101.824.947.847} \times 100\% = 95,52\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 90.505.392.908}{98.853.166.043} \times 100\% = 91,56\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 35.835.172.406}{\text{Rp } 38.521.127.789} \times 100\% = 93,03\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 98.020.251.696}{\text{Rp } 98.815.598.750} \times 100\% = 99,20\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp } 96.992.474.583}{\text{Rp } 100.707.824.427} \times 100\% = 96,31\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{\text{Rp } 1.230.965.317.333}{\text{Rp } 1.237.198.696.187} \times 100\% = 99,50\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta 2018-2023

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Kriteria
2018	Rp 101.824.947.847	Rp 97.264.267.594	95,52%	Efisien
2019	Rp 98.853.166.043	Rp 90.505.392.908	91,56%	Efisien
2020	Rp 38.521.127.789	Rp 35.835.172.406	93,03%	Efisien
2021	Rp 98.815.598.750	Rp 98.020.251.696	99,20%	Efisien
2022	Rp 100.707.824.427	Rp 96.992.474.583	96,31%	Efisien
2023	Rp 1.237.198.696.187	Rp 1.230.965.317.333	99,50%	Efisien

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 4. Capaian Indeks Demokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta (2018-2023)

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
2018	73,35%	84,73%	115%
2019	73,85%	84,08%	113%
2020	74,35%	88,29%	118%
2021	88,29%	89,21%	101%
2022	88,79%	82,08%	92%
2023	82,15%	84,3%	107%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan perhitungan rasio di atas dan hasil pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2023 masih berada dalam kategori efisien dalam hal alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan berbagai kegiatan belanja. Efisiensi tersebut tercermin dari kemampuan Bakesbangpol dalam mengelola anggaran untuk mencapai hasil yang melebihi capaian yang telah ditetapkan.

Dalam hal kinerja, pencapaian indikator strategis seperti Indeks Demokrasi menunjukkan hasil yang sangat positif, seperti yang tercatat dalam Tabel 4. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Bakesbangpol telah berhasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018 hingga 2021, serta tahun 2023, dengan persentase capaian di atas seratus persen. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan pada persentase Indeks Demokrasi, hal ini lebih disebabkan oleh perubahan metode perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterapkan pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan IDI 2022, digunakan metode baru dengan formula atau metadata yang berbeda dari metode sebelumnya yang digunakan pada perhitungan IDI tahun 2021. Oleh karena itu, hasil IDI tahun 2022 tidak dapat langsung dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan metode lama.

Meski demikian, meskipun terdapat perubahan dalam metodologi perhitungan, capaian Indeks Demokrasi pada tahun 2022 masih dapat dianggap baik, meskipun persentasenya sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan metodologis, Bakesbangpol tetap mampu menjaga kinerja yang baik dalam pencapaian indikator-indikator strategis yang mendukung perkembangan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Faktor-Faktor Efisiensi

Menurut Kaho (1997) dalam penelitian yang dikutip oleh Fahlevi & Ananta (2015), terdapat empat faktor utama efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan kegiatan pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan anggaran. SDM yang kompeten dan terampil akan mampu mengelola anggaran dengan lebih efisien. Kedua, keuangan merupakan pilar utama yang mendukung aktivitas pemerintahan daerah. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, anggaran tidak akan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Ketiga, sarana dan prasarana juga memainkan peran

penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mendukung operasional kegiatan yang efisien. Keempat, organisasi dan manajemen berfungsi sebagai alat yang mengatur dan Mengendalikan jalannya pemerintahan, memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan operasional berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Keempat faktor ini saling terkait dan berkaitan satu sama lain dalam menciptakan efisiensi anggaran yang optimal dalam pemerintahan daerah. Masing-masing faktor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran yang efisien, dan analisis terhadap setiap faktor ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana mereka berperan dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap faktor tersebut:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi anggaran. SDM yang kompeten, terampil, dan profesional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan optimal (Siregar, 2019). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai dengan pemahaman yang baik tentang anggaran dan kebijakan yang berlaku mampu mengoptimalkan penggunaan dana, serta menghindari pemborosan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, pegawai menjadi lebih terampil dalam mengelola anggaran dan dapat mengidentifikasi potensi penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli di bidang keuangan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui rekrutmen tenaga profesional serta pelatihan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

2) Keuangan

Keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam efisiensi anggaran, karena pengelolaan yang baik memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang optimal (Padang, 2021). Dalam konteks Bakesbangpol DKI Jakarta, hasil wawancara mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan keuangan yang transparan sangat diperlukan untuk menghindari pemboro-

san. Mekanisme pengelolaan anggaran yang melibatkan tahapan penyusunan yang melibatkan banyak pihak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD membantu memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan cermat. Namun, tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah keterlambatan dalam pencairan dana yang sering disebabkan oleh proses administrasi yang panjang. Keterlambatan ini menghambat pelaksanaan program sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengoptimalan teknologi dalam proses administrasi keuangan dan peningkatan transparansi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai adalah faktor penting dalam mendukung efisiensi operasional pemerintahan (Zahari dkk., 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat keras seperti komputer dan printer serta sistem digital seperti Smart Planning Budgeting sangat berperan dalam mempermudah pengelolaan anggaran. Penggunaan perangkat lunak seperti Google Drive dan Google Sheets juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, kendala utama terkait sarana dan prasarana adalah kondisi perangkat yang sudah usang dan kurang optimal. Beberapa unit kerja masih menggunakan peralatan yang tidak memadai, yang dapat menghambat kelancaran kegiatan operasional. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan teknologi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

4) Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi yang jelas dan sistem manajemen yang efisien berperan besar dalam efisiensi anggaran (Zahari dkk., 2022). Di Bakesbangpol DKI Jakarta, struktur organisasi yang linier, dengan Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, memastikan bahwa setiap tahapan anggaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, wawancara mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM di bagian keuangan, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan administrasi anggaran. Dalam hal ini, peran pimpinan sangat penting, karena pimpinan yang aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran akan mendorong pencapaian efisiensi yang lebih baik. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

keempat faktor yang telah dijelaskan yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemen—berperan secara sinergis dalam mencapai efisiensi anggaran yang optimal. Kualitas SDM yang baik memastikan pengelolaan anggaran yang tepat, sementara pengelolaan keuangan yang transparan dan matang memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas. Sarana dan prasarana yang memadai mendukung kelancaran operasional, dan organisasi yang terstruktur dengan manajemen yang baik membantu dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan kombinasi dari keempat faktor ini, Bakesbangpol DKI Jakarta dapat mencapai efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dengan lebih baik, meskipun tantangan-tantangan yang ada tetap perlu dihadapi secara berkelanjutan.

Rasio efisiensi yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan Bakesbangpol dalam mengelola anggaran dengan baik, tetapi juga berkaitan erat dengan pencapaian indikator kinerja utama seperti Indeks Demokrasi. Dalam hal ini, efisiensi anggaran mendukung pencapaian hasil yang lebih baik dalam indikator tersebut. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, Bakesbangpol dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat untuk mendukung program-program yang meningkatkan partisipasi politik, pengelolaan konflik sosial, dan pembangunan kerukunan sosial.

Namun, meningkatnya efisiensi pada tahun tertentu, seperti 2019 (91,56%) dan 2022 (96,31%), menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab terjadinya efisiensi. Di antaranya adalah perubahan metodologi perhitungan Indeks Demokrasi pada tahun 2022 yang menggunakan formula baru yang tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil tahun sebelumnya, tidak terserapnya Hibah uang untuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, hibah tidak dapat dicairkan karena adanya kendala administrasi dari pihak penerima hibah, yang baru dapat dilengkapi pada bulan Desember, di mana masa pencairan dan pertanggungjawaban sudah sangat singkat untuk Tahun Anggaran 2022. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun efisiensi anggaran masih tercatat positif, ada tantangan lain, seperti perubahan kebijakan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan yang dapat mengendalikan kinerja anggaran.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran di Bakesbangpol DKI Jakarta dapat dikatakan sangat baik, dengan hasil yang menggambarkan hubungan positif antara pengelolaan anggaran yang efisien dan pencapaian indikator kinerja, khususnya Indeks Demokrasi. Faktor-faktor

penyebab terjadinya efisiensi, seperti SDM, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemen, harus terus diperbaiki agar efisiensi anggaran dapat terus ditingkatkan, dan pencapaian tujuan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di instansi ini cukup efisien. Analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2023, Bakesbangpol mampu mengelola anggaran dengan baik, mencapai efisiensi yang konsisten di atas standar yang ditetapkan. Efisiensi ini tercermin dari penggunaan anggaran yang dapat mendukung pencapaian target kinerja, seperti Indeks Demokrasi, yang juga menunjukkan hasil positif meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 karena perubahan metodologi perhitungan.

Beberapa faktor yang berperan dalam efisiensi anggaran meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan yang transparan, sarana dan prasarana yang memadai, serta struktur organisasi dan manajemen yang baik. Keterbatasan SDM dalam bidang keuangan menjadi tantangan, namun pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dapat meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Pengelolaan keuangan yang baik, yang melibatkan transparansi dan perencanaan anggaran yang matang, juga terbukti penting dalam memastikan anggaran digunakan secara optimal.

Sementara itu, pengelolaan sarana dan prasarana yang masih menghadapi kendala perangkat yang usang harus mendapat perhatian agar operasional Bakesbangpol dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, meskipun efisiensi anggaran menunjukkan hasil yang positif, adanya tantangan internal dan eksternal, seperti perubahan kebijakan dan kendala administrasi, tetap memerlukan solusi agar efisiensi anggaran dapat terus terjaga dan semakin meningkat di masa depan. Meskipun terdapat beberapa kendala, pengelolaan anggaran di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil dalam mencapai efisiensi yang optimal. Keberlanjutan pengelolaan anggaran yang efisien ini memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang mengendalikan kinerja anggaran dan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap aspek yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin, B. (2021). Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai
1250

- Kinerja Keuangan pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 1(1), 107–114. <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/elpei>
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *JIAP*, 1(2), 37–47.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Padang, N. S. (2021). Analisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Biaya Operasioanl Pada CV Solata Travel. *ULET*, 5(1).
- Siallagan, Y. T., & Kusmilawaty, K. (2023). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(1), 165–176.
- Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 160–169. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.2240>
- Tyasisuci, jasmine. (2023). *Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Biro Sumber Daya Manusia Di Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur*. Universitas Padjajaran.
- Zahari, M., Surono, Y., & Sufriyanto. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sarana Prasarana terhadap Motivasi Serta Dampaknya pada Kinerja Anggota Polri di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 349. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.408>